

**DISPARITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR (STUDI KASUS KABUPATEN
TASIKMALAYA)**

Achmad Rizal

Laboratorium Manajemen dan Bisnis Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Padjadjaran
Gedung 4. FPIK UNPAD, Kampus Jatinangor, UBR 40600
Email : achmadrizal@unpad.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan ekonomi tidak terjadi pada waktu yang sama di berbagai daerah dan apabila di sesuatu daerah terjadi pembangunan, terdapat daya tarik yang kuat yang akan menciptakan konsentrasi pembangunan ekonomi di sekitar daerah dimana pembangunan bermula. Pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama; kemunculannya hanya terjadi di beberapa tempat atau pusat pertumbuhan, dengan intensitas yang berbeda; berkembang melalui saluran yang berbeda, dengan akibat akhir yang ditimbulkannya yang berbeda pula terhadap keseluruhan perekonomian. Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis disparitas pembangunan di wilayah pesisir yang disebabkan ketidakseimbangan dalam proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui data dan informasi tentang pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Tasikmalaya; (2) Mengetahui indeks disparitas pembangunan di kecamatan-kecamatan pesisir Kabupaten Tasikmalaya. Metode analisis yang digunakan adalah indeks williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat disparitas di wilayah pesisir dalam kurun waktu 2009-2011, memiliki indeks williamson yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah non pesisir. Hal ini menunjukkan tingkat disparitas pendapatan di wilayah pesisir lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah non pesisir.

Kata Kunci : Disparitas, wilayah pesisir, dan indeks Williamson

ABSTRAK

Economic progress does not appear every where at the same time and that once it has appeared, powerful forces make for a spatial concentration of economic growth arround the initial starting points. growth does not appear everywhere at the same time; it becomes manifest at points or poles of growth, with variable intensity; it spreads through different channels, with variable terminal effects on the whole of the economy. The background of this study is to analyze development disparity in coastal region was caused by inequality in development process. The aims of this study are : (1) To know coastal development data in Tasikmalaya Resident; (2) To know development disparity index in several districts of Tasikmalaya Resident. Analysis of Method is Williamson index. The result of this research shows that, in 2009 – 2011, Williamson disparity index of coastal region higher than non coastal region. That means the regional disparity in coastal district worst than non coastal district in Tasikmalaya Resident.

Keywords: Disparity, coastal region, and Williamson index.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecenderungan pergeseran struktur pembangunan secara spasial dari wilayah pesisir bagian selatan Jawa Barat ke bagian utara pesisir Jawa Barat berdampak pada pergeseran orientasi pembangunan. Pergerakan penduduk wilayah pesisir selatan Jawa Barat yang bermigrasi ke wilayah Utara Jawa Barat (yang umumnya wilayah perkotaan), setelah menjadi tenaga kerja terdidik yang berorientasi kepada sektor formal atau non-formal di perkotaan akan mengalami kesulitan untuk kembali ke wilayah pesisir selatan Jawa Barat (yang umumnya pedesaan).

Hal yang sama terjadi dengan arus modal, daerah yang pesat perkembangan ekonominya, pesisir Jawa Barat bagian utara, membutuhkan lebih banyak modal yang kemudian menyedot modal dari daerah lain (pesisir Jawa Barat bagian Selatan), khususnya daerah yang ekonominya belum berkembang. Daerah yang belum berkembang ini yang memang sudah kekurangan modal akan bertambah kurang pula modalnya, sehingga kegiatan ekonomi mengalami kemerosotan. Terjadi Gejala yang disebut *Backwash effect* atau pengaruh yang merugikan (Myrdal, 1957). Dengan demikian kesimbangan tidak dicapai malah menjurus kepada kepincangan yang lebih besar antara daerah Utara dan Selatan Jawa Barat. Proses tersebut cenderung

menjadi kumulatif, tidak menuju pada keseimbangan yang stabil (*stable equilibrium*).

Wilayah Utara Jawa Barat akan semakin maju (kumulatif ke atas) yang disebabkan oleh "*spread effect*" dari modal dan tenaga yang diserap. Daerah Selatan Jawa Barat akan menjadi makin mundur (kumulatif ke bawah) karena terjadi *backwash effect* dari tindakan daerah yang maju (Utara Jawa Barat).

Mekanisme yang sama terjadi pula antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Tasikmalaya. Wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya, umumnya wilayah pesisir (yang langsung berbatasan dengan laut), cenderung kurang berkembang dibanding dengan wilayah utara Kabupaten Tasikmalaya. Momentum otonomi daerah dalam konteks pembangunan wilayah pesisir (perikanan dan kelautan), tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi pemerintah daerah, tetapi juga menimbulkan problematika baru, yaitu bagaimana menyeimbangkan antar wilayah yang dapat mendongkrak dan memberi stimulan terhadap pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui data dan informasi tentang pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Tasikmalaya dan 2) Mengetahui indeks disparitas pembangunan di kecamatan-kecamatan pesisir Kabupaten Tasikmalaya.

II. DATA DAN PENDEKATAN

2.1. Disparitas Pembangunan

Pertumbuhan wilayah (*regional growth*) sebagai upaya untuk memacu perkembangan sosio-ekonomi, mengurangi disparitas, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah sangat diperlukan, karena kondisi sosial-ekonomi, budaya dan geografis yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

Mengukur disparitas pembangunan di wilayah pesisir Kabupaten Tasikmalaya (yang umumnya didominasi oleh pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan) dengan daerah lainnya merupakan hal penting sebagai upaya untuk mengevaluasi pembangunan yang sudah dilaksanakan. Disparitas adalah aspek yang akan diukur dalam penelitian ini.

Besaran disparitas yang diukur mengacu pada indeks disparitas yang terjadi antara wilayah pesisir dan non pesisir di Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan angka rasio perbandingan antara pendapatan wilayah dan jumlah penduduk.

Konsep tentang disparitas mempunyai kemiripan dengan konsep tentang perbedaan. Seseorang mempunyai tinggi tubuh yang berbeda dengan seseorang yang lain. Fakta menunjukkan adanya perbedaan tinggi tubuh. Pemahaman terhadap perbedaan seperti itu relatif bersifat netral dan tidak terkait dengan moral pemahaman. Berbeda halnya kalau membicarakan perbedaan kekayaan dari kedua orang itu, maka umumnya terdapat inklinasi

moral tertentu. Pemahaman terhadap perbedaan kekayaan mempunyai implikasi moral dalam konteks hubungan sosial, misalnya siapa yang harus lebih toleran, bagaimana pembebanan kewajiban sosial pada tiap orang itu, dan sebagainya.

Pembahasan disparitas menghendaki pendefinisian kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pendefinisian kelompok yang sejak awal sering digunakan adalah kelompok pendapatan. Masyarakat dibedakan menurut kelompok-kelompok 10 persen populasi (*decile*), mulai dari kelompok 10 persen populasi berpendapatan terendah, kelompok 10 persen populasi berikutnya dengan pendapatan yang lebih tinggi, dan seterusnya. Cara pengelompokan lain adalah berdasarkan tingkat pendapatan: 40 persen populasi dengan pendapatan terendah, 40 persen berikutnya dengan tingkat pendapatan menengah, dan 20 persen populasi yang berpendapatan tinggi. Selain pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan, pengukuran disparitas juga menggunakan daerah sebagai basis pengelompokan. Pengelompokan berbasis daerah tersebut mempunyai implikasi pengamatan disparitas masyarakat antar daerah. Berbagai cara pengelompokan lain yang telah biasa digunakan adalah kelompok masyarakat wilayah desa dan masyarakat wilayah kota. Selain itu, saat ini juga berkembang perhatian terhadap pengukuran disparitas berbasis gender.

Kondisi disparitas kesejahteraan umumnya dinyatakan dalam bentuk indikator disparitas. Berbagai studi pada umumnya menggunakan kurva distribusi Lorenz dan indeks pemerataan distribusi Gini. Berbagai studi lain menggunakan indikator disparitas antar daerah yang pertama kali diperkenalkan oleh Williamson. Penghitungan indeks Gini dilakukan berbasis pada kurva distribusi Lorenz, sedangkan indeks Williamson berbasis kepada angka varian dalam distribusi statistik.

Disparitas pembangunan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu faktor alami, kondisi sosial budaya, dan keputusan-keputusan kebijakan. Teori-teori mengenai proses disparitas pada umumnya menekankan kepada peranan satu atau lebih faktor tersebut. Faktor alami meliputi kondisi agroklimat, sumberdaya alam, letak geografis, jarak pelabuhan dengan pusat aktivitas ekonomi, wilayah potensial untuk pembangunan ekonomi. Sementara faktor sosial budaya meliputi nilai, tradisi, mobilitas ekonomi, inovasi, dan kewirausahaan. Terakhir faktor keputusan kebijakan adalah sejumlah kebijakan yang mendukung secara langsung atau tidak langsung terjadinya disparitas pembangunan (*United Nation*, 2001).

2.2. Penelitian Disparitas

Rangkaian berbagai penelitian tentang disparitas ditandai oleh tonggak-tonggak temuan. Kuznets (1954) tercatat sebagai salah

satu peneliti awal dalam meneliti disparitas. Ia meneliti disparitas di berbagai negara secara *cross-sectional* dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat disparitas juga rendah.

Ketika pendapatan rata-rata naik, maka disparitas juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka disparitas akan turun kembali. Penelitian yang telah dilakukan oleh Williamson (1966) menekankan pada disparitas antar wilayah di dalam negara. Williamson menghubungkan disparitas pendapatan rata-rata antar wilayah dengan berbagai faktor termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah.

Di samping pola dan faktor penentu disparitas, peneliti juga mengamati proses terjadinya disparitas. Myrdal (1968) melakukan penelitian tentang sistem kapitalis yang menekankan kepada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah yang memberikan harapan tingkat keuntungan tinggi akan berkembang menjadi sentra perkembangan kesejahteraan. Di sisi lain, wilayah-wilayah dengan harapan tingkat keuntungan yang rendah tidak akan berkembang sehingga terjadi disparitas. Teori efek polarisasi menjelaskan disparitas antarwilayah yang meningkat karena berpindahnya faktor produksi dari wilayah yang terbelakang ke wilayah yang lebih maju. Sebaliknya terdapat teori yang menjelaskan proses yang berlawanan arah, yaitu teori efek

penetasan yang menjelaskan penyebaran faktor produksi dari suatu wilayah yang telah maju ke wilayah yang belum maju karena di wilayah yang telah maju terjadi eksternalitas negatif yang makin besar.

2.3. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir, adalah wilayah dimana daratan bertemu dengan lautan dan air tawar bertemu dengan air asin. Wilayah ini merupakan sistem ekologi yang paling produktif serta beragam dan kompleks. Zona ini berperan sebagai penyangga, pelindung, dan penyaring diantara daratan dan lautan. Dari sisi ekologis kawasan pesisir merupakan tatanan ekosistem yang memiliki hubungan sangat erat dengan daerah lahan atas (*upland*), baik melalui aliran air sungai, air permukaan (*run off*) maupun air tanah (*ground water*). Kawasan yang terwujud sebagai zona endapan ini, tidak hanya menjadi tempat bertumpuknya bahan erosi yang diangkut oleh sungai-sungai tetapi juga tempat berakumulasinya berbagai jenis limbah bahan beracun yang bersumber dari kegiatan-kegiatan di daerah pedalaman daratan (hulu) (Dahuri, et.al, 1996).

Wilayah pesisir memiliki potensi sumberdaya hayati yang melimpah yang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Potensi wilayah pesisir (terutama sumberdaya perikanan dan kelautan) yang memiliki kekayaan sumberdaya, cukup banyak dimanfaatkan, walaupun pemanfaatannya

tidak cukup merata. Pemanfaatan ini lebih terpusat pada wilayah pesisir yang padat penduduknya (seperti pantai utara Jawa Barat). Sementara di kawasan lain seperti kawasan selatan Jawa Barat bahkan masih rendah pemanfaatannya. Perbedaan tipologi kawasan ini membawa pengaruh yang cukup besar dimana terjadi pemanfaatan yang melebihi kapasitas daya dukung atau keberlanjutan sumberdaya di satu wilayah. Sementara di wilayah lain, terjadi pemanfaatan wilayah yang rendah.

2.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Kasus yang diambil adalah wilayah pesisir Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Metode studi kasus ini menggunakan metode analisis ketimpangan pembangunan. Ukuran untuk menganalisis seberapa besarnya disparitas antar wilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson (Williamson, 1965). Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah dengan rumus :

$$(1) V_w = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}}$$

V_w = Weighted variation
 y_i = pendapatan perkapita kecamatan
 \bar{y} = pendapatan perkapita kabupaten
 f_i = jumlah penduduk kecamatan
 n = jumlah penduduk Kabupaten

$$(2) V_{uw} = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}}$$

V_{uw} = unweighted variation

Ini berarti bahwa pada dasarnya indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran, dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah-daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Nilai indeks berkisar antara 0 dan 1 (yaitu $0 < V_w < 1$), semakin mendekati nilai 1, berarti terjadi ketimpangan yang semakin tinggi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dihasilkan oleh Biro Pusat Statistik Tasikmalaya, Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

III. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Tasikmalaya terletak di sebelah Tenggara Propinsi Jawa Barat, dan secara astronomis terletak antara $107^{\circ} 56' \text{ BT} - 108^{\circ} 8' \text{ BT}$ dan $7^{\circ} 10' \text{ LS} - 7^{\circ} 49' \text{ LS}$ dengan jarak membentang Utara Selatan sepanjang 75 Km

dan arah Barat Timur 56,25 Km. Luas keseluruhan sebesar 271.251,71 Km².

Secara administrasi Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 Kecamatan, yang meliputi 351 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kab. Majalengka/ Ciamis/Kota Tasikmalaya
- Sebelah Barat : Kab. Garut
- Sebelah Timur : Kab. Ciamis
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah desa dan luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 1 yaitu luas wilayah dan jumlah desa setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa Kecamatan yang memiliki luas wilayah relatif besar yaitu: Kecamatan Cipatujah sebesar 24,465,45 ha, meliputi 15 Desa. Adapun kecamatan yang memiliki luas wilayah relatif kecil yaitu : Kecamatan Sukaresik sebesar 1.749,88 ha meliputi 8 desa, dan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit yaitu: Kecamatan Karangjaya dengan luas wilayah sebesar 4.785,56 ha meliputi 4 desa.

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa Setiap Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa
1	Cipatujah	24.465,45	15
2	Karangnunggal	13.944,35	14
3	Cikalong	14.062,05	13
4	Pancatengah	19.996,82	11
5	Cikatomas	13.514,13	9
6	Cibalong	5.835,75	6

No	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa
7	Parungponteng	5.040,19	8
8	Bantarkalong	5.999,98	8
9	Bojongasih	3.885,30	6
10	Culamega	6.265,76	5
11	Bojongsambir	15.036,60	10
12	Sodonghilir	9.911,21	12
13	Taraju	5.868,09	9
14	Salawu	6.101,73	12
15	Puspahiang	4.509,44	8
16	Tanjungjaya	3.815,51	7
17	Sukaraja	4.691,38	8
18	Salopa	11.120,35	9
19	Jatiwaras	8.899,23	11
20	Cineam	7.900,99	10
21	Karangjaya	4.785,56	4
22	Manonjaya	4.470,83	12
23	Gunungtanjung	4.323,43	7
24	Singaparna	1.945,01	10
25	Mangunreja	2.665,35	6
26	Sukarame	2.443,29	6
27	Cigalontang	12.626,19	16
28	Leuwisari	4.460,33	7
29	Padakembang	4.013,85	5
30	Sariwangi	4.085,15	8
31	Sukaratu	4.440,12	8
32	Cisayong	4.833,05	13
33	Sukahening	3.208,91	7
34	Rajapolah	2.327,77	8
35	Jamanis	1.799,57	8
36	Ciawi	4.523,93	11
37	Kadipaten	4.738,21	6
38	Pagerageung	6.946,97	10
39	Sukaresik	1.749,88	8
	J U M L A H	271.251,71	351

Sumber: Subdinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya, 2012

3.2. Topografi

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya.

Bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl. Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya menurut ketinggian dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Luas Wilayah dan Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya

<i>No</i>	<i>KECAMATAN</i>	<i>LUAS WILAYAH (ha)</i>	<i>KETINGGIAN (mdpl)</i>
1	Cipatujah	24.465,45	0 – 500
2	Karangnunggal	13.944,35	0 - 400
3	Cikalong	14.062,05	0 - 200
4	Pancatengah	19.996,82	100 - 350
5	Cikatomas	13.514,13	50 - 500
6	Cibalong	5.835,75	100 - 600
7	Parungponteng	5.040,19	150 - 700
8	Bantarkalong	5.999,98	250 - 750
9	Bojongasih	3.885,30	250 - 700
10	Culamega	6.265,76	200 - 750
11	Bojonggambir	15.036,60	100 - 950
12	Sodonghilir	9.911,21	200 - 900
13	Taraju	5.868,09	350 – 1.250
14	Salawu	6.101,73	500 – 1.450
15	Puspahiang	4.509,44	350 – 1.500
16	Tanjungjaya	3.815,51	250 - 600
17	Sukaraja	4.691,38	200 - 550
18	Salopa	11.120,35	200 -1.150
19	Jatiwaras	8.899,23	150 - 600
20	Cineam	7.900,99	100 - 950
21	Karangjaya	4.785,56	150 - 900
22	Manonjaya	4.470,83	200 - 500
23	Gunungtanjung	4.323,43	300 – 1.000
24	Singaparna	1.945,01	400 – 450
25	Mangunreja	2.665,35	400 - 600
26	Sukarame	2.443,29	350 - 450
27	Cigalontang	12.626,19	450 – 2.100
28	Leuwisari	4.460,33	450 – 1.450
29	Padakembang	4.013,85	400- 850
30	Sariwangi	4.085,15	500 - 900
31	Sukaratu	4.440,12	450- 2.200
32	Cisayong	4.833,05	400 – 1.800
33	Sukahening	3.208,91	500 – 1.800
34	Rajapolah	2.327,77	450 - 600
35	Jamanis	1.799,57	450 - 800
36	Ciawi	4.523,93	500 -1.750
37	Kadipaten	4.738,21	600 – 1.550
38	Pagerageung	6.946,97	500 – 1.500
39	Sukaresik	1.749,88	400 - 500

Sumber : Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, 2012

3.3. Penggunaan Lahan dan Kawasan Budidaya

Secara garis besar penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya meliputi : Sawah, Pekarangan (Permukiman), Tegalan/Kebun, Ladang/Huma, Padang Rumput, Hutan, Perkebunan, Kolam/empang. Dari klasifikasi tersebut yang memiliki prosentase terbesar yaitu : Kawasan Hutan yang meliputi hutan rakyat dan hutan negara yaitu sebesar : 24,25 %, Tegalan/Kebun campuran yaitu sebesar 23,53 %, dan sawah yang meliputi sawah irigasi teknis, semi teknis, dan tadah hujan yaitu sebesar 18,12 %, lahan Kolam/empang memiliki prosentase terkecil yaitu sebesar 1,75 % (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2012).

Sebagaimana diisyaratkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata

Tabel 3. Indikator Makro Tahun 2007-2011

No.	INDIKATOR MAKRO	2007	2008	2009	2010	2011
1	Indeks Pembangunan Manusia	58,73	61,83	66,59	68,28	69,40
2	Jumlah Penduduk*)	1.565.906	1.582.793	1.606.711	1.626.497	1.649.867
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)*)	1,3	1,35	1,42	1,23	1,30
4	Jumlah Penduduk Miskin (<i>jiwa</i>) & % <i>thd penduduk</i> *)	466.360	420.574	386.649	374.369	480.332
5	<i>PDRB (berlaku) (Rp. Trilyun)</i>	3,99	4,32	4,86	5,17	5,70
6	<i>Inflasi (%) *</i>	16,71	10,29	3,88	5,92	9,46
7	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi (konstan 2003) (%)</i>	2,95	3,12	3,23	3,44	3,83
8	<i>PDRB per kapita (berlaku) (Rp.)</i>	2.679.284	2.853.939	3.348.997	3.605.798	4.486.221
9	<i>Investasi (Rp. Trilyun)</i>	1,67	1,93	2,16	2,33	2,51
10	<i>Laju Investasi (konstan 1993)</i>	-	10,05	11,92%	7,87%	7,72%
11	<i>Konsumsi Pemerintah (G) (berlaku)(Rp Milyar)</i>	-	517,97	520,93	580,1	592,30
12	Jumlah Penduduk yang bekerja	590.177	711.811	719.356	722.708	776.044
13	Proporsi jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk total	37,69	46,35	44,69	44,43	57,29
14	Jumlah Pengangguran Terbuka*)	35.578	34.881	34.042	33.795	34.176

Sumber: Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, 2012

Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, bahwa Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari kawasan Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan, Pariwisata, Pengembangan Kegiatan Industri, Pengembangan Kegiatan Pertambangan, Pengembangan Pertanian, Hutan Produksi, Hutan Rakyat.

3.4. Indikator Makro Kewilayahan

Sebagai indikator dari tingkat kesejahteraan masyarakat, IPM masih merupakan tujuan utama pencapaian pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, kondisi IPM dan perekonomian makro sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 3.

3.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Tasikmalaya dari tahun ketahun, sejak terpisah dari Kota Tasikmalaya, terus menerus mengalami peningkatan. Dari hanya 58 pada tahun 2008 hingga mencapai hampir 70 pada tahun 2012, sehingga masuk kategori menengah/ sedang. Tujuan jangka menengah selanjutnya adalah mencapai kategori tinggi (72 keatas) pada tahun 2012 (Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, 2012).

3.6. Jumlah dan Laju Pertumbuhan penduduk

Jumlah pertumbuhan penduduk cukup dapat dikendalikan sampai pada rata-rata kisaran 1,3 % pertahun, sehingga pertumbuhan penduduk tidak terlalu melonjak pada tahun 2006 sebesar 1.649.867 jiwa. Bertambah 83.961 jiwa selama lima tahun terakhir.

Dari 1,6 juta jiwa penduduk Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 432 ribu jiwa

(26,20%) masuk dalam kategori miskin. Penduduk miskin pada tahun 2011 kembali mengalami kenaikan signifikan, setelah menurun dari tahun 2008, hal ini diindikasikan disebabkan oleh kenaikan BBM yang hampir mencapai 100 %. Kenaikan BBM tersebut secara tajam menurunkan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang semula di sekitar garis kemiskinan turun di bawah garis kemiskinan dan meningkatkan jumlah penduduk miskin.

3.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dan perbandingannya dengan propinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai berikut :

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tasikmalaya dan Prop. Jawa Barat Tahun 2007-2011 (%)

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Elastisitas pertumbuhan Ekonomi Kab. Tasikmalaya- Jawa Barat
	Kabupaten Tasikmalaya	Propinsi Jawa Barat	
2007	2,95	3,84	0,77
2008	3,12	4,39	0,71
2009	3,23	4,92	0,66
2010	3,44	5,99	0,57
2011	3,83	5,00	0,77
Rata-rata elastisitas			0,70

Sumber : BPS Kab. Tasikmalaya dan BPS Propinsi Jawa Barat (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu dari 2,95 % pada tahun 2007 menjadi 3,44 % pada tahun 2010. Tingkat elastisitas terhadap pertumbuhan

propinsi rata-rata 0,70 %, berarti untuk setiap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 1% mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya 0,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Tasikmalaya masih dibawah pertumbuhan Jawa Barat dan belum berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya terutama disebabkan oleh naiknya produksi yang menyumbang cukup

besar yaitu sektor pertanian terutama sub sektor Tanaman Bahan Makanan. Gambaran selengkapnya mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya per sektor dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tasikmalaya per Sektor Tahun 2010-2011 (%)

No.	Sektor	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000		Atas Dasar Harga Berlaku 2000	
		2010	2011	2010	2011
1.	Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	2,97	4,01	7,54	20,83
2.	Pertambangan dan penggalian	2,27	2,14	6,78	20,57
3.	Industri Pengolahan	4,17	4,00	11,35	26,82
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	5,18	6,90	12,63	29,61
5.	Bangunan	4,18	3,74	12,43	69,35
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,54	2,89	10,81	24,23
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,55	5,00	13,34	29,78
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa	4,52	2,87	11,08	24,54
9.	Jasa-jasa	2,32	4,49	7,65	24,56
	Pertumbuhan PDRB	3,44	3,83	9,29	26,25

Sumber : BPS Kab. Tasikmalaya, 2012.

Pertumbuhan sektoral di Kabupaten Tasikmalaya terutama pada sektor pertanian mengalami peningkatan cukup tajam terutama pada harga berlaku (hingga lebih dari 200%) walaupun pada pertumbuhan menurut harga konstan, yang menunjukkan peningkatan produksi peningkatannya lebih kecil. Hal ini menunjukkan peningkatan harga yang tajam dari komoditi pertanian melebihi peningkatan produksi pertanian itu sendiri. Hanya masih harus diteliti kembali apakah peningkatan harga tersebut sampai pada tingkat petani, atau pada tingkat tengkulak yang tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Secara umum masing-masing sektor usaha mengalami

peningkatan harga cukup besar pada tahun 2011, hal ini dimungkinkan karena kenaikan harga BBM yang mengakibatkan kenaikan harga pada hampir seluruh komoditi.

3.8. Kondisi Umum Wilayah Pesisir

Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar, baik bagi usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kabupaten Tasikmalaya memiliki wilayah laut di sebelah Selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia dan Negara Australia. Oleh karena itu, termasuk dalam kawasan laut Selatan Jawa yang berombak besar dan karang yang terjal. Wilayah pesisir Kabupaten

Tasikmalaya memiliki panjang garis pantai 54,5 Km yang terbentang dari Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Ciamis hingga Kabupaten Garut di bagian Barat. Wilayah tersebut melintasi 11 Desa Pesisir di 3 (tiga) kecamatan. Desa – desa tersebut adalah Desa Ciandum, Ciheras, Cipatujah, Sindangkerta, Cikawungading (Kecamatan Cipatujah), Desa Cidadap (Kecamatan Karangnunggal), Desa Mandalajaya, Sindangjaya, Cikadu,

Kalapagenep, dan Cimanuk (Kecamatan Cikalong).

Jumlah penduduk di 11 desa pesisir pada tahun 2011 mencapai 54.261 orang dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan adalah 27.323 orang dan 26.938 orang. Sebagian besar masyarakat desa pesisir berprofesi sebagai petani/peternak (71%) dan buruh nelayan (15%). Luas wilayah dan jumlah penduduk di 11 desa pesisir dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Luas wilayah dan jumlah penduduk di 11 desa pesisir Kabupaten Tasikmalaya

Kecamatan	Desa Pantai	Penduduk		Jumlah Penduduk	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
Cipatujah	Ciheras	2679	2601	5280	1519
	Ciandum	2533	2420	4953	1402
	Cipatujah	2470	2440	4910	1500
	Sindangkerta	3084	2904	5988	1801
	Cikawungading	3335	3260	6595	1924
Sub Jumlah		14101	13625	27726	8146
Karangnunggal	Cidadap	2209	2279	4488	1372
Sub Jumlah		2209	2279	4488	1372
Cikalong	Mandalajaya	2624	3145	5769	1691
	Cikadu	1518	1541	3059	1025
	Sindangjaya	2301	2238	4539	1303
	Kalapagenep	2557	2557	5114	1438
	Cimanuk	1904	1765	3669	1064
Sub Jumlah		10904	11246	22150	6521
Jumlah Total		27214	27150	54364	16039

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, 2012.

Khusus di bidang perikanan tangkap (ikan laut) potensi laut di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 6.640 Ton/tahun sedangkan pemanfaatan yang telah dilakukan masyarakat baru mencapai 435,60 ton/tahun pada tahun 2011 atau sekitar 6,60 % dari potensi optimal. Data lebih jelas mengenai

potensi dan tingkat pemanfaatan perikanan tangkap dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Potensi dan tingkat pemanfaatan perikanan tangkap di Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Produksi (Ton)	% Pemanfaatan
1	2005	184,00 ton/tahun	2,77 %
2	2006	259,70 ton/tahun	3,91 %
3	2007	268,50 ton/tahun	4,04 %
4	2008	276,80 ton/tahun	4,17 %
5	2009	286,50 ton/tahun	4,31 %
6	2010	296,30 ton/tahun	4,46 %
7	2011	435,60 ton/tahun	6,60 %
8	2012	513,90 ton/tahun	7,74 %

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, 2012.

Untuk pengembangan potensi dan pemanfaatan sumber daya ikan di Kabupaten Tasikmalaya, untuk tahun 2012 Dinas Peternakan perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya juga kembali dipercaya untuk mengelola Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan keuangan mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan.

Pemanfaatan potensi kelautan di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi sesungguhnya. Kontribusi sektor kelautan terhadap PDRB masih sangat rendah jika dibandingkan kontribusi sector usaha lain, yaitu kurang dari 4%. Padahal potensi kelautan khususnya perikanan tangkap cukup besar. Pemanfaatan potensi kelautan merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi

masyarakat Tasikmalaya bagian selatan yang relatif masih rendah. Permasalahannya pengembangan komoditas kelautan ini berkaitan dengan investasi yang dibutuhkan yang cukup besar. Sehingga dalam waktu yang singkat tidak akan terjangkau oleh petani/nelayan setempat. Disamping itu prasarana yang tersedia seperti armada dan alat penangkapan, pelabuhan perikanan serta transportasi masih minim. Di wilayah pesisir Kabupaten Tasikmalaya, masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan tercatat sebanyak 3.670 orang yang terdiri dari nelayan laut, buruh, pengolah, bakul dan nelayan pantai dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 8. Sebaran Penduduk Wilayah Pesisir Kabupaten Tasikmalaya

No	Kecamatan/Desa	Jml Penduduk Th. 2011 (orang)	Jml Nelayan (orang)
A.	CIPATUJAH		
	1. Ciheras	4,580	586
	2. Ciandum	3,925	375
	3. Cipatujah	4,453	365
	4. Sindangkerta	5,560	343
B.	5. Cikawungading	5,854	425
	KARANGNUNGGAL		
C.	1. Cidadap	4,005	287
	CIKALONG		
	1. Mandalajaya	4,882	276
	2. Sindangjaya	3,258	425
	3. Kalapagenep	4,789	250
	4. Cimanuk	3,150	120
	5. Cikadu	2,999	218

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, 2012.

Pembangunan sektor kelautan merupakan salah satu program pembangunan prioritas di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Tasikmalaya yang secara umum pembangunan tersebut tidak hanya meliputi sub sektor perikanan tangkap semata tetapi juga meliputi seluruh sektor yang memanfaatkan fungsi dan potensi kelautan dan pesisir pantai. Sejalan dengan era otonomi daerah yang diiringi dengan menguatnya tuntutan demokratisasi, peningkatan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta perhatian pada potensi dan keanekaragaman daerah, upaya pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi salah satu alternatif bagi peningkatan peran serta masyarakat. Tumbuhnya lembaga ekonomi berbasis sumberdaya kelutan dan perikanan di wilayah pesisir yang akhirnya bisa

mengurangi beban masyarakat pesisir dari tekanan ekonomi yang semakin berat.

3.9. Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir

Disparitas pembangunan di wilayah pesisir dan non pesisir di Kabupaten Tasikmalaya diukur dengan menggunakan koefisien distribusi pembangunan (*williamson index*). Data yang digunakan dalam perhitungan ini adalah pendapatan perkapita kecamatan dan perkapita kabupaten. Tabel 9 berikut menyajikan indeks williamson di Kabupaten Tasikmalaya untuk wilayah pesisir dan non pesisir.

Tabel 9. Indeks Williamson Kabupaten Tasikmalaya (pesisir dan non pesisir)

Indeks		2009	2010	2011
Vw	pesisir	0,34690	0,34738	0,34752
	nonpesisir	0,12845	0,12883	0,12894
Vuw	pesisir	0,00227	0,00225	0,00224
	nonpesisir	0,00012	0,00011	0,00011

Indikator yang diukur dalam ukuran disparitas ini adalah *weighted coefficient of variation* (**Vw**) dan *Unweighted coefficient of variation* (**Vuw**). Indeks Vw menunjukkan penyebaran pendapatan perkapita yang ditimbang melalui jumlah penduduk kabupaten. Nilai Vw yang tinggi menggambarkan bahwa terjadi disparitas pendapatan secara regional. Sementara Vuw menunjukkan penyebaran disparitas pendapatan perkapita penduduk di dalam suatu wilayah yang lebih rendah, yaitu kecamatan. Hasil indeks williamson pada Tabel 9 di atas, dalam kurun waktu 2009-2011, tingkat disparitas pendapatan di wilayah pesisir lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah non pesisir.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya pesisir di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Berdasarkan indeks williamson, disparitas di wilayah pesisir menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah non pesisir.

4.2 Saran

1. Untuk mengurangi disparitas pembangunan di kawasan pesisir kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah harus mendorong kebijakan pembangunan yang menjawab langsung kebutuhan masyarakat pesisir, seperti subsidi BBM bagi nelayan.
2. Perlu penelitian serupa dengan metode penelitian yang berbeda untuk mendapatkan gambaran sebenarnya dari kondisi disparitas wilayah di Kabupaten Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda dan BPS Kabupaten Tasikmalaya. 2011. Tasikmalaya Dalam Angka. Kabupaten Tasikmalaya.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Tasikmalaya. 2011. PDRB Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Tasikmalaya. 2012. Tasikmalaya Dalam Angka. Kabupaten Tasikmalaya.
- Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting., M.J. Sitepu.
1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
Pesisir dan Lautan secara Terpadu.
Pradnya Paramita, Jakarta.

Myrdal, Gunnar. 1968. Asian Drama: An
Inquiry into the Poverty of Nations.
London. Allen Lane.

Subdinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Tasikmalaya, 2012. Laporan Tahunan
Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya.

United Nation. 2001. Economics and Social
Commision for Asia and The Pacific.
Red. Disparitas : Balance Development
of Urban and Rural Areas and Region
Within the Countries of Asia and The
Pacific. New York. Page 8.

Williamson, JG. 1965. Regional Inequality
and The Process National Development:
Description of the Patterns, Chicago
University. USA.